



LKjIP

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga merupakan implementasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....ii

DAFTAR TABEL .....iii

**BAB I           PENDAHULUAN**

    A. LATAR BELAKANG.....1

    B. GAMBARAN UMUM.....1

    C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS .....3

    D. SISTEMATIKA PENULISAN .....5

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

    A. RENCANA STRATEGIS .....6

    B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....7

    C. PERJANJIAN KINERJA .....8

**BAB III          AKUNTANBILITAS KINERJA**

    A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....10

    B. REALISASI ANGGARAN .....14

**BAB IV          PENUTUP**

    A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL...17

    B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA  
        DATANG .....17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar .....7

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024 .....8

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.....9

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....10

Tabel 3.2 Pelayanan PPKS .....11

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dinsos Prov. Jawa Tengah .....12

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....13

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Anggaran .....13

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran.....14

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan sosial selama Tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2024-2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2029. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

### B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

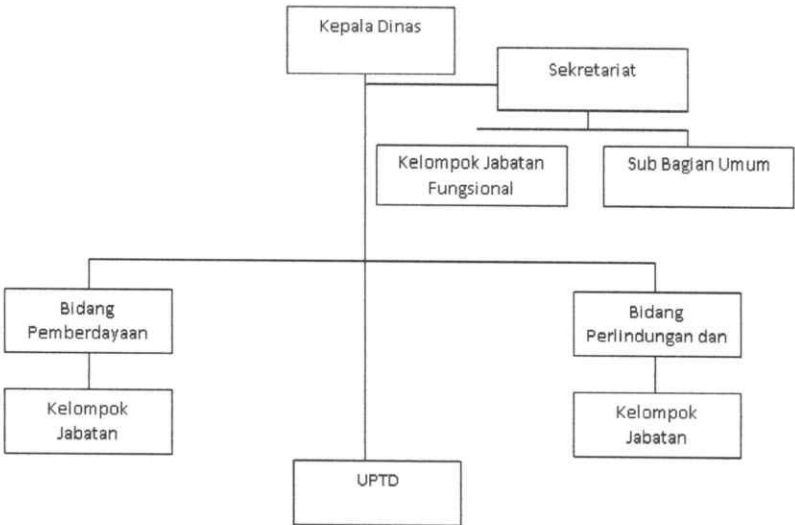
Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar. Adapun Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :





C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Bantuan dan Jaminan Sosial melalui misi yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial, Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Rawan Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tingginya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum Optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
3. Masih terdapatnya inxclusion error dan exlusion error dalam Basis Data Terpadu (BDT).

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Landasan yuridis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

| SASARAN                                              | INDIKATOR                                                    | TARGET KINERJA SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |      |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|
|                                                      |                                                              | 2024                                     | 2025 | 2026   |
| Meningkatnya perlindungan sosial bagi PPKS           | Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 71 %                                     | 72 % | 72,5 % |
| Meningkatnya tata laksana pemerintahan urusan sosial | Nilai SAKIP OPD                                              | 71                                       | 72   | 73     |

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2024, sebagai berikut :



Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan 2024

| NO | SASARAN                                                       | INDIKATOR SASARAN                                                       | TARGET |       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | 2                                                             | 4                                                                       | 5      |       |
| 1  | Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi PPKS                    | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani | 71     | %     |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                         | 71     | Nilai |

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan

Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA                                                       | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                           | 3                                                                       | 4      |
| 1  | Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PPKS                  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | 71%    |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintah Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                         | 71     |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Lebih dari 100%       | Sangat Baik |
| 2  | 75 – 100%             | Baik        |
| 3  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4  | Kurang dari 55 %      | Kurang      |

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :



3.1 Pencapaian Indikator Kinerja

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja

| No | Indikator Kerja                                                         | Satuan | Tahun 2024 |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                                         |        | Target     | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | %      | 71         | 71,28     | 100,39    |
| 2. | Nilai SAKIP OPD                                                         | Nilai  | 71         | 70,25     | 98,94     |

NB : Capaian Nilai SAKIP OPD menggunakan realisasi tahun 2023

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2024 diatas sebesar 100,39% Melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sejumlah 147.266, Jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2024 sebanyak 104.972 atau 71,28%. Capaian penanganan PMKS pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan karena banyaknya program-program dari Kementrian Sosial yang disalularkan melalui Dinas Sosial kabupaten sehingga capaian realisasi penanganan PMKS sangat tinggi.

Rumus Perhitungan Sebagai berikut :

PMKS yang ditangani Tahun 2024

PMKS Th.2024

X 100

104.972

147.266

X 100 = 71,28 %

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dinsos Provinsi Jawa Tengah

Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja antara Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, dengan fokus pada satu indikator utama: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.

Perbandingan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana masing-masing instansi melaksanakan program sosial di tingkat kabupaten dan provinsi, serta dapat menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dinsos Prov. Jawa Tengah

| No                                   | Indikator Kerja                                                          | Satuan | Target Capaian Kinerja Tahun 2024 |                             | Capaian Kinerja Tahun 2024 |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                                                          |        | Dinsos Karanganyar                | Dinsos Provinsi Jawa Tengah | Dinsos Karanganyar         | Dinsos Provinsi Jawa Tengah |
| 1.                                   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. | %      | 100                               | 100                         | 100,39                     | 100                         |
| Persentase Capaian Sasaran Strategis |                                                                          |        |                                   |                             | 100,39                     |                             |

3.3 Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika kinerja Dinas Sosial Karanganyar dalam menangani isu sosial, serta menjadi dasar untuk mengevaluasi dan merancang strategi perbaikan di tahun mendatang agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| NO | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA                                                       | TAHUN 2023 |           |           | TAHUN 2024 |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                             |                                                                         | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN % | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN % |
| 1  | 3                                                           | 4                                                                       | 5          | 6         | 7         | 8          | 9         | 10        |
| 1  | Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PPKS                  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | 69,34      | 70,58     | 101,78    | 71         | 71,28     | 100,39    |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintah Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                         | 71         | 70,25     | 98,94     | 71         | 70,25     | 98,94     |

NB : Capaian Nilai SAKIP OPD menggunakan realisasi tahun 2023

3.4 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1.1, sebagaimana table 3.5.

Tabel 3.5  
Analisis Evisiensi Anggaran

| Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                                       | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi Anggaran (%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PPKS                  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | 100,39%             | 98,49%                  | 1,51%                  |
| Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintah Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                         | 98,94               | 92,50%                  | 7,5%                   |

NB : Capaian Nilai SAKIP OPD menggunakan realisasi tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 14.183.935.007,- dengan realisasi sebesar Rp.13.709.448.787,- (95,68%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran

| PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1                                                                                     | 2              | 3               | 4      |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 4.346.587.109  | 4.020.505.211   | 92,50  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 35.246.900     | 35.243.600      | 99,99  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 9.087.900      | 9.085.900       | 99,98  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.159.000     | 26.157.700      | 100    |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 2.816.331.259  | 2.525.623.188   | 89,68  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2.816.331.259  | 2.525.623.188   | 89,68  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 970.200        | 924.000         | 95,24  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 970.200        | 924.000         | 95,24  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 327.280.270    | 323.529.310     | 98,85  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.531.550     | 10.531.550      | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 26.604.520     | 26.299.790      | 98,85  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 1.560.000      | 1.560.000       | 100    |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 34.000.000     | 34.000.000      | 100    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 242.584.500    | 239.138.270     | 98,58  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 3.800.000      | 3.800.000       | 100,00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 219.607.500    | 216.470.000     | 98,57  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 219.607.500    | 216.470.000     | 98,57  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 593.513.480    | 579.694.149     | 97,67  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 863.300        | 863.300         | 100    |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 152.800.000    | 143.234.669     | 93,74  |

| PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                               | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 1                                                                                                                                                             | 2              | 3               | 4     |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                             | 33.939.200     | 31.305.200      | 92,24 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                         | 405.910.980    | 404.290.980     | 99,60 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         | 353.637.500    | 339.020.964     | 95,87 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                           | 184.524.000    | 170.971.400     | 92,66 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  | 169.113.500    | 168.049.564     | 99,37 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                   | 680.235.400    | 672.802.450     | 98,91 |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 680.235.400    | 672.802.450     | 98,91 |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                       | 680.235.400    | 672.802.450     | 98,91 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | 1.342.028.050  | 1.300.950.440   | 96,94 |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis                                 | 1.149.925.550  | 1.114.211.750   | 96,89 |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | 203.916.200    | 193.694.200     | 94,99 |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 946.009.350    | 920.517.550     | 97,31 |
| Penyedia Alat Bantu                                                                                                                                           | 55.775.000     | 55.775.000      | 100   |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                             | 136.327.500    | 130.963.690     | 96,07 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                       | 7.626.563.748  | 7.527.036.736   | 98,69 |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 7.626.563.748  | 7.527.036.736   | 98,69 |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 1.291.000.000  | 1.266.921.100   | 98,13 |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                              | 6.299.563.748  | 6.227.039.736   | 98,85 |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                            | 36.000.000     | 33.075.900      | 91,88 |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                    | 150.559.000    | 150.192.250     | 99,76 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                             | 150.559.000    | 150.192.250     | 99,76 |



| PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | %      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1                                                         | 2              | 3               | 4      |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                    | 150.559.000    | 150.192.250     | 99,76  |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  | 37.961.700     | 37.961.700      | 100,00 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 37.961.700     | 37.961.700      | 100,00 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 37.961.700     | 37.961.700      | 100,00 |
| JUMLAH                                                    | 14.224.701.916 | 13.610.472.456  | 95,68  |

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar Terealisasi 95,68 % dengan jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 474.486.220,-.



## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik.

### B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu serta anak korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PPKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PPKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PPKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PPKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PPKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PPKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.

6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PPKS dan kapasitas PSKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Pj. BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

| No | Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja                                                       | Target |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PPKS                    | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | 71 %   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                         | 71     |

| Program                                                        | Anggaran            | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.346.587.109,- | APBD       |
| 2. Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp. 680.235.400,-   | APBD       |
| 3. Program Rehabilitasi Sosial                                 | Rp. 1.342.028.050,- | APBD       |
| 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Rp. 7.626.563.748,- | APBD       |
| 5. Program Penanganan Bencana                                  | Rp. 150.559.000,-   | APBD       |
| 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Rp. 37.961.700,-    | APBD       |

**Jumlah : Rp. 14.183.935.007,-**

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI KARANGANYAR  
  
TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR  
  
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SEKRETARIAT DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

| No | Program dan Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                     | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                     | 4      |
| 1  | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase Indikator OPD (IKU<br>dan IKK) yang Tercapai<br>Targetnya  | 100 %  |
| 1  | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah      | Terwujudnya Pelayanan<br>Administrasi Perencanaan dan<br>Keuangan     | 100 %  |
| 2  | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | Terwujudnya Pelayanan<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah    | 100 %  |
| 3  | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                | Terwujudnya Pelayanan<br>Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah | 100 %  |
| 4  | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                          | Terwujudnya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                     | 100 %  |
| 5  | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah      | Terwujudnya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                            | 100 %  |
| 6  | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Terwujudnya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                     | 100 %  |
| 7  | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Terwujudnya Pemeliharaan barang<br>milik daerah                       | 100 %  |

| Program                                                           | Anggaran            | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.346.587.109,- | APBD       |

Jumlah : Rp. 4.346.587.109,-

Karanganyar, 4 November 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

SULISTYOWATI, A.KS., M.M.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690111 199203 2 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

| No          | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                               | Target       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (1)         | (2)                                                                    | (3)                                                             | (4)          |
| <b>I.</b>   | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>                                     | <b>Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>                 | <b>100 %</b> |
| 1.          | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial | 100 %        |
| <b>II.</b>  | <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>                         | <b>Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya</b> | <b>100 %</b> |
| 1.          | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota            | Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran             | 100 %        |
| <b>III.</b> | <b>Program Penanganan Bencana</b>                                      | <b>Cakupan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial</b>         | <b>100 %</b> |
| 1.          | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota      | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial     | 100 %        |
| <b>V</b>    | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>                        | <b>Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>    | <b>100 %</b> |
| 1           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                 | 100 %        |

| Program                                     | Anggaran                     | Keterangan |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Program Pemberdayaan Sosial              | Rp. 680.234.400,-            | APBD       |
| 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Rp. 7.626.563.748,-          | APBD       |
| 3. Program Penanganan Bencana               | Rp. 150.559.000,-            | APBD       |
| 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Rp. 37.961.700,-             | APBD       |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>: Rp. 8.495.318.848,-</b> |            |

Karanganyar, 4 Noember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR

**Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
DAN PEMBINAAN SOSIAL

  
**SARNO, S.Kar., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19670705 199403 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
 BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

| No  | Program dan Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                        | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                | (3)                                                                                      | (4)    |
| I.  | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                        | Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial                                               | 100%   |
| 1.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penanganan Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT | 100%   |
| 2.  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Penanganan Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis                     | 100%   |

| Program                                                    | Anggaran              | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Rp. 1.342.028.050,-   | APBD       |
| Jumlah                                                     | : Rp. 1.342.028.050,- |            |

Karanganyar, 4 November 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR

Plt . KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN  
 DAN REHABILITASI SOSIAL

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650925 198603 1 015

SULISTYOWATI, A.KS., M.M.  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19690111 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KASUBBAG UMUM  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

| No   | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1)  | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                    | (4)         |
| I.   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan</b>                                                                                                     | <b>100%</b> |
| 1.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | 6 dokumen   |
| 2.   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 dokumen   |
| II.  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan</b>                                                                                                                     | <b>100%</b> |
| 1.   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 bulan    |
| III. | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |
| 1.   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                                                                                              | 2 paket     |
| IV.  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor</b>                                                                                                                       | <b>100%</b> |
| 1.   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                                                     | 1 paket     |
| 2.   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                                                         | 1 paket     |
| 3.   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                                                                                                    | 1 paket     |
| 4.   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan                                                                                                              | 1 paket     |
| 5.   | Fasillitasi Kunjungan Tamu                                                            | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                                                                                               | 12 laporan  |
| 6.   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                                                    | 12 laporan  |

|             |                                                                                                                     |                                                                                                        |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.          | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                    | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                                   | 4 dokumen   |
| <b>V.</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor</b>                                                         | <b>100%</b> |
| 1.          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                | 2 unit      |
| <b>VI.</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor</b>                                                       | <b>100%</b> |
| 1.          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | 12 laporan  |
| 2.          | Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 12 laporan  |
| 3.          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | 12 laporan  |
| 4.          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 12 laporan  |
| <b>VII.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                    | <b>100%</b> |
| 1.          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 73 unit     |
| 2.          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 1 unit      |



| Kegiatan                                                                 | Anggaran            | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 35.246.900,-    | APBD       |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 2.816.331.259,- | APBD       |
| 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Rp. 970.200,-       | APBD       |
| 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 327.280.270,-   | APBD       |
| 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Rp. 219.607.500,-   | APBD       |
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 593.513.480,-   | APBD       |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 353.637.500,-   | APBD       |
| Jumlah : Rp. 4.346.587.109,-                                             |                     |            |

SEKRETARIS

**SULISTYOWATI, A.KS., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690111 199203 2 009

Karanganyar, 4 November 2024

KASUBAG UMUM



**DWI RAHAYU, SE.MM**  
Pembina  
NIP. 19750622 199803 2 003

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah : Dinas Sosial  
Tahun Anggaran : 2024

| Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja                                                   | Satuan | Target | Realisasi | %      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi PPKS                    | Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | %      | 71     | 71,28     | 100,39 |
| Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Urusan Sosial | Nilai SAKIP OPD                                                     | Nilai  | 71     | 70,25     | 98,94  |

NB : Capaian Nilai SAKIP OPD menggunakan penilaian tahun 2023

Karanganyar, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015